

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan diciptakan untuk berpasang-pasangan. Oleh karenanya Allah menganjurkan setiap hambaNya untuk menikah. Seperti dalam Firman-Nya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan yakni Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melangsungkan sunnatullah tersebut yakni pernikahan, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan tersebut. salah satu diantaranya yaitu terkait usia. Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.”² Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang

¹ Q.S. Al Rūm, [30]:21.

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana ilmu populer,2017), hal. 4

harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia tersebut dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat taat pada aturan yang mengacu pada Undang-undang. Namun pada realitanya, masih banyak yang melakukan perkawinan yang dapat dikatakan belum mencukupi batas minimal menurut Undang-undang.

Dalam implementasinya, perkawinan yang dikatakan belum cukup umur tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Hal ini dapat peneliti anggap bahwa aturan tersebut merupakan satu fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam praktik pernikahan dini yang semakin marak ini, meskipun pada hakikatnya pemerintah telah memunculkan aturan dalam hal pembatasan usia perkawinan itu sebagai upaya melindungi institusi perkawinan dari berbagai penyalahgunaannya.

Seperti yang Peneliti katakan bahwa Negara ini telah memberi satu kemudahan dalam melakukan praktik nikah dibawah standar usia. Yang mana aturan tersebutlah yang kemudian dapat dijadikan acuan masyarakat yang ingin menikah dini dengan permohonan dispensasi yang diminta oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Tentu dengan maraknya pernikahan dini ini menurut fakta dilapangan juga turut serta dalam menambah angka perceraian di Pengadilan Agama, yang banyak dipicu dari faktor psikologis yang belum matang, sehingga pasangan-pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah dari sebuah pernikahan, sehingga mahligai perkawinan yang diidam-idamkan kurang tercapai secara maksimal dalam berkeluarga maupun bermasyarakat.³

Meskipun Negara Indonesia ini turut berkontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan perkawinan yang kerap terjadi pada masyarakat era saat ini dengan memunculkan peraturan pembatasan usia perkawinan dalam Pasalnya, namun sayangnya keadaan dilapangan mengalami kendala jauh dari apa yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia itu sendiri. Aturan pemerintah pada batasan minimal usia dalam perkawinan yang pada awalnya untuk mencegah banyaknya pernikahan dini pada masyarakat, kini justru semakin marak hingga menjadi suatu fenomena atau *trend* tersendiri pada beberapa daerah. Khususnya pada daerah Kabupaten Nganjuk ini dalam hal permohonan Dispensasi Perkawinan masih berada pada angka yang relatif tinggi yang mana rata-rata pada setiap bulannya mendapati angka 10 permohonan bahkan

³ Marmiati Mawardi. "Problematika Perkawinan dibawah Umur". *Jurnal Analisa* vol 19 (Juli, 2012), hal. 202

lebih pada tahun 2017 terakhir.⁴ Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait fenomena permohonan Dispensasi Perkawinan yang tampaknya selalu tercatat dalam rekapitulasi perkara masuk pada setiap bulannya. Dengan tingginya angka pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk ini tentu berdasarkan banyak alasan. Ironinya, alasan yang paling menunjang atau dapat dikatakan secara dominan yaitu disebabkan oleh hamil diluar nikah.⁵

Dengan melihat banyaknya kasus tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam baik dari segi pertimbangan hakim dalam penetapannya, maupun ditinjau dari fiqh islam. Maka peneliti mengangkat topik tersebut kedalam sebuah Skripsi yang berjudul “HAMIL PRANIKAH SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim terkait pelaksanaan Akad atas perempuan hamil hasil zina jika ditinjau dari fiqh Islam?

⁴ Data statistik perkara diputus tahun 2017 dari Pengadilan Agama Nganjuk

⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, Iskandar Eko Putro, pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 dan Bagaimana jika ditinjau dari Hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan fiqh islam dalam memandang pelaksanaan akad atas perempuan hamil hasil zina.
2. Mengetahui faktor Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 dan Bagaimana jika ditinjau dari Hukum Positif.

Adapun penelitian ini dapat diambil manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya seputar fenomena Dispensasi Perkawinan
2. Memberi sumbangan pemikiran bagi penegak keadilan dan seluruh masyarakat Indonesia.

Manfaat Praktis:

1. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Al Ahwal As-Sakhsiyyah (Syari'ah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan khususnya mengenai Dispensasi Perkawinan.
3. Sebagai referensi bagi pemecahan masalah yang relevan dengan penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai perkawinan dibawah umur adalah pada Jurnal “Analisa” Vol. 19 No. 2, Juli 2012. Dengan judul “Problematika Perkawinan Dibawah Umur”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur dalam kehidupan keluarga dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur itu sendiri.⁶

Kemudian ada Skripsi yang disusun oleh Siti Malekha dari Fakultas Dakwah IAIN dengan judul “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”. Penelitian membahas mengenai bagaimana dampak psikologis akibat pernikahan dibawah umur tersebut.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1, Januari 2011. Dengan judul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”. Penelitian ini membahas mengenai aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia perspektif perlindungan anak. Penelitian tersebut menekankan terhadap norma-norma hukum yang tertuang

⁶ Marmiati Mawardi, “Problematika Perkawinan dibawah Umur”. *Jurnal Analisa* vol 19 (2012)

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan pendapat para ahli hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.⁷

Dengan sekian hasil penelitian tersebut diatas, kiranya terdapat pandangan penulis yang berbeda terhadap fokus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi persamaan antara peneliti di atas dengan penelitian ini yakni terletak dari segi penelitian yang membahas mengenai Perkawinan dibawah umur, namun penelitian di atas belum ada yang memaparkan tentang alasan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil serta pembahasan mengenai menikahi wanita hamil dari segi fikih islam. Maka penulis tertarik untuk membahas “Hamil Pranikah Sebagai Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk pada Tahun 2017”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian ini digunakan dengan model

⁷ Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” diakses pada tanggal 13 Mei 2018

<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/601/718>

menganalisis atau menggambarkan data yang dituangkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dengan menggunakan perhitungan.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mana bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan; (c) putusan hakim.⁹

Data primer dalam skripsi ini yakni:

- 1) Hasil wawancara dengan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk
- 2) Dokumen salinan putusan pengajuan perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2017

b. Data Sekunder

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari sumber data primer dengan kata lain sebagai data kepustakaan yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur baik berupa internet, undang-undang, KHI, maupun buku-buku yang sesuai dengan pembahasan ini.

⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reser*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hal. 7

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yakni dengan wawancara Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk dengan menggunakan rekaman suara sebagai metode pengumpulan data. Kemudian peneliti juga menggunakan Dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data ini dapat berupa dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, notulen, atau dokumen-dokumen baik dari Pengadilan setempat maupun melalui kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan metode kualitatif yakni metode yang lebih kepada pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dikaji untuk lebih mengetahui dan memahami realitas sosial yang mana dengan melihat kenyataan-kenyataan mengenai apa yang telah dirumuskan. Yang kemudian hasil kajiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis induktif. Singkatnya, dalam proses menganalisis data dengan cara pengklasifikasian data melalui pengumpulan laporan dokumen maupun wawancara yang dideskripsikan sesuai dengan konteks permasalahan, kemudian dianalisis dan diambil suatu kesimpulan secara general lalu diuraikan menurut fakta-fakta konkrit berupa faktor-faktor penyebab Dispensasi Perkawinan serta dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan

permohonan Dispensasi Perkawinan untuk memperoleh pengetahuan atau hal-hal baru yang dapat dijadikan bahan temuan.¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam penelitian skripsi ini membagi kedalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah terdiri dari pendahuluan, yang mana dalam bab ini dijabarkan tentang masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan skripsi ini, yang diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah berupa kajian teori terkait tinjauan-tinjauan umum mengenai perkawinan serta penjelasan tentang Dispensasi Perkawinan itu sendiri baik dari segi hukum positif maupun dalam kacamata fiqh.

Bab III adalah berupa pembahasan dari hasil penelitian dan analisa yang membahas dan menjawab dari rumusan masalah yakni jawaban tentang pandangan Hakim mengenai pelaksanaan akad atas perempuan hamil hasil zina jika ditinjau dari fiqh islam, serta dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan permohonan Dispensasi Perkawinan pada tahun 2017 serta analisis penulis dalam mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan

¹⁰Sony, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, dalam <http://makalahupdate.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-motode-induktif-dan-motode.html?m=1>, diakses tanggal 13 Mei 2018. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

permohonan Dispensasi Perkawinan dengan alasan hamil diluar nikah berdasarkan Hukum Positif.

Bab IV adalah penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti terkait Hamil Pranikah Sebagai Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan Tahun 2017 di Pengadilan Agama Nganjuk.

